

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan suatu kelompok dari beberapa orang yang dimana anggota- anggotanya memiliki orientasi, nilai- nilai serta cita- cita yang sama untuk kepentingan organisasi atau partai politik yang di usung. Tujuan dari kelompok atau partai politik tersebut adalah untuk dapat memperoleh suatu kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk dapat melaksanakan programnya.¹ Dikatakan dalam UU No. 2 tahun 2008 mengenai partai politik, menegaskan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional serta di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dalam dunia politik di Indonesia partai politik memiliki suatu peran yang dapat di katakan penting dalam suatu sistem pemerintahan yang demokrasi yang bertujuan untuk mengembangkan atau memajukan bangsa dan negara sekaligus tujuan dibentuk atau didirikan partai politik tidak hanya untuk menduduki suatu jabatan atau kekuasaan namun juga untuk menyetarakan atau mensinergikan seluruh potensi yang ada didalam suatu negara. Tak hanya itu saja, adanya partai politik ini juga memungkinkan seluruh bagian masyarakat untuk dapat serta merta berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang kemudian nantinya dengan adanya partai politik ini juga akan dapat terpilih jabatan- jabatan tinggi dengan menyatukan berbagai kelompok atau elemen yang beragam sebagai salah satu power atau kekuatan yang terpadu sehingga dapat menjadi suatu penghubung yang dibutuhkan antara cabang-cabang serta

¹ Miriam Budiarjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, 2008, Jakarta: Gramedia, hal. 404

² Republik Indonesia, UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum, 2011

tiap tingkat pemerintahan yang berbeda, kemudian juga akan dapat mendorong partisipasi aktif dalam ranah politik, menuntut agar politisi dapat bertanggung jawab atas berbagai tindakan mereka, dan juga mendorong untuk melakukan suatu diskusi maupun perdebatan (polemik) mengenai isu-isu penting atau terbaru.³

Partai politik sendiri memiliki fungsi, fungsi utama dari partai politik yaitu untuk mencari serta mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun dengan berdasarkan pada ideologi tertentu ataupun juga untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan yang belum atau yang sudah dilakukan guna tercipta atau terwujudnya keselarasan dalam berbagai aspek dan menunjuk calon yang dianggap kuat atau memiliki kemampuan untuk bersaing guna kemajuan negara dan bangsa. Apapun cara yang di gunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam rangka memperoleh serta mempertahankan kekuasaan yakni dengan keikutsertaan dalam pemilihan umum. Partai politik baik dalam sistem politik apapun, apalagi sistem politik demokrasi, ia pasti harus dapat melaksanakan sejumlah fungsi salah satunya adalah fungsi rekrutmen politik dimana terdapat suatu seleksi dan pemilihan anggota- anggota partai untuk dapat menciptakan pemimpin yang berintegritas, dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berintegritas tak hanya saja berfokus pada kepentingan partai politik yang di wakilinya, akan tetapi saat menjadi pemimpin yang berwawasan nasional seorang pemimpin harus dapat menjadi pemimpin bagi seluruh kalangan tidak hanya pada kelompoknya saja guna terwujudnya kepentingan bangsa dan negara yang kedepannya dapat dirasakan hasil atau manfaatnya bagi masyarakat. Seorang pemimpin ini tentu tidak lahir dengan sendirinya melainkan perlu adanya suatu proses seperti pendidikan yang baik yang bersifat formal ataupun non formal yang kemudian hal ini nantinya akan mampu membentuk suatu karakter pemimpin, tidak hanya dari aspek atau latar belakang pendidikan yang diutamakan namun juga rekan jejak atau track record dari calon tersebut baik atau tidaknya sehingga juga akan dapat

³ Katz, S.Richard, William Crotty, dan Asnawi, Ahmad (penerjemah). 2014. Handbook Partai Politik. Bandung: Penerbit Nusa Media. Hal 130

meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap calon tersebut. Dalam partai politik dalam tubuh organisasi partai politik terdapat adanya suatu strategi rekrutmen, seleksi serta kaderisasi politik, yang di mana hal ini berfungsi untuk pembaruan/ perbaikan regenerasi kepemimpinan politik yang ada di negara Indonesia ini.

Pada pasal 29 UU No.2 Tahun 2011 di jelaskan bahwa partai politik melakukan suatu rekrutmen kepala warga negara untuk dapat menduduki suatu jabatan politik yang diantaranya sebagai anggota partai politik, kandidat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden.⁴ Menurut Miriam Budiarjo, Partai politik sebagai suatu sarana rekrutmen politik juga berfungsi untuk mencari serta mengajak orang yang berbakat untuk dapat turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.⁵ Adanya rekrutmen politik ini merupakan seleksi serta pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk dapat melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya serta pemerintahan pada khususnya, makin besar fungsinya tak kala partai politik ini mayoritas di parlemen, sehingga berwenang untuk dapat membentuk pemerintahan dalam sistem demokrasi.

Dalam perekrutan anggota partai politik, partai politik akan secara terbuka menerima atau merekrut anggota dari kalangan pemuda atau usia muda yang secara akademis atau poengalaman cukup mumpuni untuk menjadi anggota baru dalam partai politik. Pada kanca perpolitikan sendiri adanya sosok peran pemuda dalam partai politik pada saat ini mulai di perhitungkan. Palsnya pemuda merupakan generasi penerus bangsa, seorang pemuda juga memiliki peran penting dalam melakukan suatu proses perubahan. Tak hanya itu saja adanya pemuda juga merupakan seorang agen perubahan yang akan dapat mewujudkan berbagai aspek seperti dalam aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Dengan demikian tak heran bila banyak para pemuda yang berbondong- bondong untuk dapat terjun langsung dalam kanca perpolitikan.

⁴ Republik Indonesia, UU No.2/2008 tentang Partai Politik, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum,2011

⁵ Miriam Budiarjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik,2008,Jakarta:Gramedia,hal.408

Para pemuda- pemuda ini kemudian menggunakan sarana agar dapat terjun dalam kanca perpolitikan yakni dengan melalui partai politik. Saat ini pun dalam dunia perpolitikan di Indonesia banyak sekali partai politik yang mulai melirik serta merekrut para pemuda untuk dapat ikut bergabung kedalam partai politik. akan tetapi dengan begitu tak jarang bila kebanyakan dari partai-partai politik yang ada merekrut para kader-kader pemuda dengan asal – asalan dan terkesan asal comot begitu saja tanpa adanya dilakukan suatu proses rekrutmen yang baik dan benar, misalnya dengan memanfaatkan kepopolaritasan calon anggota tersebut guna meningkat suara atau meningkatkan peluang terpilihnya calon tersebut. Adanya hal tersebut akhirnya berdampak pada kinerja para pemuda tersebut yang masuk dalam ranah politik dalam partai politik.

Banyaknya para pemuda yang bergabung dalam ranah politik membuat partai politik menyadari bahwa adanya peran pemuda ini memiliki dampak besar untuk adanya suatu perubahan bangsa yang lebih baik kedepan dan dipilihnya calon kader partai politik berusia muda juga bertujuan untuk menampung aspirasi kaum muda dan juga untuk terciptanya ide-ide atau gagasan yang lebih fresh atau yang inovatif untuk perkembangan dan kemajuan partai politik atau negara. Hal demikian ini terlihat jelas pada saat Pemilihan Legislatif 2019. Tak sedikit kaum pemuda yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019 dengan mencalonkan diri sebagai calon kandidat anggota legislatif. Kebanyakan pemuda saat ini dianggap sebagai usia produktif, karena peranan pemuda memiliki potensi yang besar dan memberikan dampak besar terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia. Pada saat era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi peran serta adanya partisipasi pemuda sangat besar untuk menyuarakan demokrasi. Adanya peristiwa sumpah pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, serta adanya reformasi 1998 membuktikan bahwa adanya peran pemuda dalam meyarakan demokrasi begitu mendominasi dan berkat adanya kontribusi yang dilakukan oleh kaum pemuda juga berdampak besar bagi kemajuan bangsa dan negara serta membuat ideology terhadap negara menjadi berkembang dan luas.

Pada saat ini juga sangat banyak sekali partai politik yang mulai untuk memperhitungkan adanya peran pemuda untuk dapat meregenerasi kepemimpinan yang ada, walaupun adanya peran pemuda ini dirasa belum cukup mampu dalam mengkritisi serta menanggapi berbagai persoalan yang berhubungan dengan perpolitikan di negara Indonesia pada saat ini. Akan tetapi dengan adanya peran dari para pemuda ini dirasa akan mampu untuk dapat menampung segala aspirasi dari masyarakat dan kaum muda-mudi serta juga dapat memberikan suatu angin segar untuk dapat mengakomodasi atau menampung segala aspirasi terutama bagi kaum muda-mudi untuk kemajuan negara. Dengan adanya peran dari para pemuda ini masyarakat percaya bahwa adanya pemuda ini dalam perpolitikan akan dapat memberi perubahan untuk kemajuan negara serta melahirkan potensi pemimpin negara yang lebih baik dari tokoh pemimpin lama yang dimana pada saat ini lebih mendominasi dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

Pada setiap partai politik tentu memiliki suatu sistem maupun aturan yang berbeda-beda terutama dalam hal perekrutan anggota partai guna untuk mencari calon anggota yang kredible baik dalam aspek latar belakang pendidikan, rekam jejak atau track record untuk menciptakan calon anggota partai yang diinginkan. Adapun anggota yang direkrut oleh partai politik adalah orang yang memiliki suatu potensi atau kemampuan, memiliki bakat atau softskill yang di butuhkan dalam menduduki suatu jabatan politik, tak hanya itu saja di setiap partai politik tentunya juga memiliki beberapa kategori yang lebih di fokuskan pada setiap kalangan masyarakat, seperti partai politik yang fokus pada mahasiswa dan ada pula partai politik yang fokus pada buruh. Di dalam partai politik sendiri untuk menduduki suatu jabatan politik setiap partai memiliki strategi atau cara-cara dalam melakukan rekrutmen anggota partai politik untuk kemudian melakukan kaderisasi anggota partai politik. Dalam perekrutan anggota partai politik selain untuk menduduki suatu jabatan tertentu strategi tersebut juga untuk memperkuat atau memperbanyak basis atau simpatisan agar dalam pemilihan yang akan datang membuat peluang terpilih semakin besar.

Adanya partai politik di negara Indonesia pun terbilang sangat banyak, salah satunya partai yang ada di Indonesia yakni partai Nasional Demokrasi atau sering disebut dengan partai Nasdem, partai ini merupakan partai yang di deklarasikan dan diketuai oleh Surya Paloh pada 26 juli 2011 yang di kenal dengan gerakan restorasi Indonesia. Adapun gerakan restorasi Indonesia sendiri merupakan gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi Indonesia pada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁶ Partai Nasdem ini tergolong partai baru, akan tetapi Partai Nasdem sendiri mempunyai perkembangan yang sangat pesat dalam struktur organisasi atau sinergi disetiap provinsi daerah maupun pelosok serta dapat di terima baik oleh masyarakat, dengan Partai Nasdem ini di terima di kalangan masyarakat Indonesia maka Partai Nasdem ini justru memiliki tugas yang besar untuk dapat mempertahankan prestasi atau pencapaiannya saat ini serta citra atau image yang sudah di bangun sangat baik di kalangan masyarakat. Dengan perkembangan Partai Nasdem yang pesat bahkan pada segi organisasi internal dan organisasi tiap daerah hingga ke pelosok seluruh provinsi. Adanya isu restorasi Indonesia pun mendapat tanggapan serta sambutan luas serta antusias dari adanya para calon pemilih Partai Nasdem. Partai Nasdem sendiri baru mengikuti ajang pemilu legislatif pada tahun 2014 dan hingga pada tahun 2019 yang merupakan tahun kali kedua bagi partai ini dalam keikutsertaannya pada ajang pemilu legislatif, partai Nasdem memiliki tujuan atau pandangan untuk dapat memperkuat kesinergian internal partai dengan melakukan perekrutan anggota partai dan calon legislatif. Kemudian anggota-anggota dari partai nasdem tersebut akan diberikan pendidikan serta pelatihan mengenai dasar-dasar partai politik dengan tujuan agar dapat menjalankan tugasnya sebagai kader yang baik dan menjalankan

⁶ Sejarah Partai Nasdem. di akses 30 maret 2019 :
<http://beta.partainasdemo250.org/partai/page/2>

segala tujuan dan cita-cita partai. Adapun sistem kaderisasi di partai nasdem sendiri dibedakan menjadi beberapa bagian yang di antaranya yakni kader tunas, kader dasar, kader madya, kader paripurna, dan anggota kehormatan. Kader Tunas merupakan anggota yang belum mengikuti pengkaderan. Kader Dasar merupakan anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang di selenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang. Kader Madya merupakan anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang di selenggarakan oleh Pimpinan Wilayah. Kader Paripurna merupakan anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat. Anggota kehormatan merupakan mereka yang berjasa dan berperan penting dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dalam partai nasdem sendiri dengan adanya sistem pengkaderan yang dibagi dalam beberapa bagian ini diharapkan para kader partai nasdem ini akan dapat terus berkembang serta memperkuat jaringan internal dari Partai Nasdem itu sendiri. Adapun politisi serta tokoh muda yang mempunyai pengaruh cukup besar dan penting di kalangan beberapa pemuda Kota Malang diantaranya yaitu Gagah Soeryo Pamoekti, Gatot Subiantoro ST, Wahyu Ika Setyaningsih S.Sos, Yuliana Safitri, Taufan Nudin, Hj. Anggit Krekating Galih yang merupakan caleg muda dari Partai Nasdem. Adanya beberapa tokoh muda dari Partai Nasdem ini sendiri nantinya diharapkan akan dapat memiliki suatu peluang untuk dapat memperoleh suara besar dan mempunyai banyak pendukung yang akan memilih caleg muda adari partai Nasdem dalam pileg 2019 dikota Malang sehingga caleg muda Partai Nasdem Kota Malang ini akan dapat terpilih menjadi anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Malang 2019.

Tabel 1. Hasil Survei Elektabilitas

NO	NAMA PARTAI	PERSENTASE
1.	PDIP	24,8%
2.	Gerindra	15,7%
3.	Golkar	9,8%

4.	PKB	7,2%
5.	Demokrat	5,1%
6.	Nasdem	4,9%
7.	PKS	4,1%
8.	PPP	3,6%
9.	PAN	3,2%
10.	PSI	1,4%
11.	Perindo	1,3%
12.	Hanura	0,8%
13.	PBB	0,4%
14.	Berkarya	0,4%
15.	PKPI	0,3%
16.	Garuda	0,2%
17.	Tidak tahu atau tidak menjawab	17,1%

(sumber: <http://pdiperjuangan-jatim.com/elektabilitas-parpol-menurut-survei-terbaru-tiga-lembaga/>)

Dari hasil survei yang dilakukan tersebut pada pemilu 2019 diperoleh data berikut tingkat elektabilitas partai politik berdasarkan survei charta politika. PDIP(24,8%), Gerindra(15,7%), Golkar(9,8%), PKB(7,2%), Demokrat(5,1%), Nasdem(4,9%), PKS(4,1%), PPP(3,6%), PAN(3,2%), PSI(1,4%), Perindo(1,3%), Hanura(0,8%), PBB(0,4%), Berkarya(0,4%), PKPI(0,3%), Garuda(0,2%), Tidak tahu atau tidak menjawab(17,1%).⁷ Dari hasil survei elektabilitas partai politik, partai Nasdem menunjukkan bahwa memang angka kepercayaan public kepada partai Nasdem dapat dikatakan cukup besar. Bahkan dari nilai persentase tersebut memungkinkan partai Nasdem untuk dapat meraih banyak suara terlebih partai Nasdem sendiri yang mencalonkan kadernya dari kalangan pemuda yang memiliki pengaruh dan simpatisan yang cukup banyak.

⁷ Diakses melalui <http://pdiperjuangan-jatim.com/elektabilitas-parpol-menurut-survei-terbaru-tiga-lembaga/> tanggal 9 september 2019

Dalam perkembangannya partai nasdem ini mendapat perhatian dan antusias yang sangat besar terutama bagi masyarakat kota Malang, hal ini di buktikan dengan adanya sistem kepengurusan partai nasdem yang ada di kota Malang yang terdiri atas DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dikhususkan untuk mewakili ditingkat kota, kemudian ada DPC (Dewan Perwakilan Cabang) yang dikhususkan untuk mewakili ditingkat kecamatan, dan ada pula DPRt (Dewan Pimpinan Ranting) yang di khusukan untuk mewakili di tingkat kelurahan. Adapun sistem kepengurusan partai nasdem yang demikian di kota Malang diharapkan dengan kepengurusan yang hingga pada tingkat paling bawah yakni DPRt yang mewakili di tingkat kelurahan akan dapat mewakili dan menampung semua aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam proses pemilihan atau perekrutan calon legislatif di kota Malang Partai Nasdem menggunakan aturan atau regulasi partai untuk menjalankan segala proses pemilihan, seperti dalam AD ART Partai Nasdem yang di dalamnya terdapat ketentuan untuk menjalankan musyawarah cabang yang dimana musyawarah ini berfungsi untuk mengusulkan nama-nama dari calon sementara dari anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota yang kemudian hasil dari musyawarah ini akan di serahkan dan dilaporkan pada Dewan Pimpinan Daerah untuk kemudian dilakukan seleksi lebih lanjut serta musyawarah daerah yang dimana hal ini berfungsi untuk menjaring serta menyeleksi nama-nama dari calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota.

Adapun Partai Nasdem sendiri juga memiliki strategi serta ketentuan tertentu dalam merekrut calon legislatifnya salah satunya yakni dengan tidak memungut biaya untuk menjadi calon legislatif dari partai nasdem, tak hanya itu saja partai nasdem sendiri telah menyiapkan guna untuk dapat membiayai dana kampanye dari para calon legislatifnya. Pendanaan yang dilakukan ini bertujuan untuk mengurangi adanya tindak korupsi atau penyelewengan yang di lakukan oleh calon legislatif setelah mereka resmi atau terpilih menjadi anggota legislatif di karenakan dari kejadian pemilihan legislatif yang telah terjadi tidak sedikit calon legislatif yang pontang-panting atau kesulitan mencari

dana kampanye sehingga tak heran bila banyak sekali dari para calon legislatif yang berhutang untung mendanai kampanyenya, namun setelah mereka terpilih mereka justru melakukan tindak korupsi dikarenakan mereka harus menutupi semua hutang-hutang atau biaya yang mereka pakai pada saat mereka maju dalam pemilihan legislatif. Partai Nasdem sendiri melakukan pendanaan ini tidak melalui perorangan calon melainkan pendanaan ini di berikan per dapil, dengan hal ini di harapkan Partai Nasdem akan dapat mencapai target kursi yang di tetapkan oleh partai nasdem di parlemen. Adanya dukungan secara materi ini untuk biaya atau dana kampanye di maksudkan agar kader dapat serius dalam bekerja di lapangan untuk dapat memperoleh banyak suara dalam pemilihan legislatif. Partai Nasdem sendiri lebih untuk mengutamakan kadernya karena menurut Partai Nasdem sendiri kader- kader inilah yang nantinya akan dapat membesarkan, memajukan serta mensinergikan tujuan partai tersebut.

Pada saat merekrut calon legislatif Partai Nasdem selalu untuk menjalin komunikasi dengan para pihak yang potensial atau berpeluang besar untuk direkrut menjadi caleg dari Partai Nasdem. Adapun komunikasi politik sendiri menurut Ramlan Surbakti adalah suatu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat serta dari masyarakat kepada pemerintah guna terjalinnya sinergi antara pemerintah kepada masyarakat.⁸ Dan dalam hal tersebut partai politik berfungsi sebagai suatu komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan serta penjelasan pemerintah kepada masyarakat yang sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter namun juga menyampaikan segala aspirasi serta kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Dan kedua hal tersebut dilakukan oleh partai politik dalam sistem politik demokrasi.

Walapun Partai Nasdem ini merupakan partai yang masih terbilang baru akan tetapi Partai Nasdem dikota Malang ini sendiri optimis untuk dapat meraih suara terbanyak dalam pemilihan calon legislatif 2019 di kota Malang terutama pada pencalonan anggota legislative mudanya, tentu saja optimis dari Partai

⁸ Ramlan Surbakti.2010, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta. Hal.149

Nasdem ini di buktikan dengan hasil pemilihan calon legislatif pada 2019 yang dimana jumlah kursi dari partai nasdem sendiri bertambah hingga 300 persen yang dimana kursi tersebut telah di duduki oleh calon legislatif muda. Ketua DPD Nasdem kota Malang Hanan Jalil juga menjelaskan bahwa terdapat calon terpilih berdasarkan hasil pemilihan calon legislatif 2019 kota Malang calon terpilih ini nantinya akan menduduki kursi legislatif DPRD kota Malang periode 2019-2024.⁹ Dari calon legislatif yang telah terpilih ini diharapkan akan membawa harapan baru bagi masyarakat, meski usia masih muda namun kinerja dari calon terpilih ini akan dapat di pertanggung jawabkan serta akan amanah dan mampu bekerja secara maksimal partai nasdem sendiri mengedepankan generasi muda sebagai pemimpin masa depan bangsa Indonesia, tak hanya itu saja namun calon terpilih ini nantinya di harapkan akan dapat bersinergi baik dengan pemerintah serta juga mengkritisi pemerintah yang lalai seperti menjejahterakan masyarakat, menyehatkan masyarakat. Dengan adanya calon legislatif muda ini diharapkan apa yang sudah direncanakan dapat dijalankan atau direalisasikan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dengan terpilihnya caleg muda ini nantinya diharapkan akan dapat mengabdikan sebaik mungkin terhadap bangsa dan negara serta menjalankan amanah masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dalam pemilihan legislatif di Kota Malang ini pembagian wilayah daerah pemilihannya di bagi menjadi lima dapil yang di antaranya dapil 1 kecamatan kedung kandang, dapil 2 kecamatan sukun, dapil 3 kecamatan klojen, dapil 4 kecamatan lowokwaru, dapil 5 kecamatan blimbing.¹⁰ Dimana dalam pemilihan legislatif kota Malang 2019 ini akan di perebutkan sebesar 45 kursi DPRD dengan jumlah penduduk total sebanyak 834.545 jiwa.

⁹ Benni Indo.2019, Hasil Pileg 2019 Kota Malang – Kursi Nasdem Naik 300 Persen, Dua Diantaranya Direbut Caleg Muda ini, di akses 21 april 2019 yang tersedia di : <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/05/01/dua-caleg-muda-nasdem-berpeluang-besar-lolos-ke-dprd-kota-malang?page=3>

¹⁰ Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. 2017, KPU Kota Malang Sosialisasikan Penyusunan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD dalam Pemilu 2019, diakses 21 april 2019 yang tersedia di : <https://kpud-malangkota.go.id/berita/kpu-kota-malang-sosialisasikan-penyusunan-penataan-dapil-dan-alokasi-kursi-dprd-dalam-pemilu-2019>

Dengan adanya kandidat calon legislatif yang dimiliki partai Nasdem serta pembagian dapil ini diharapkan para kandidat ini akan dapat menguasai setiap dapil agar dapat memenangkan pemilu legislatif 2019 serta memperoleh jumlah suara terbanyak untuk partai Nasdem. Dan adanya kandidat calon legislatif muda dalam partai Nasdem ini tentu akan memunculkan strategi yang bermacam-macam untuk dapat merekrut para pemuda agar bergabung dalam partai nasdem. berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan, penulis ingin mengetahui bagaimana proses dan strategi rekrutmen yang di lakukan partai nasdem serta mengapa partai Nasdem ini melakukan rekrutmen dengan prioritas pada caleg muda dan semua hal tersebut apakah sudah sesuai dengan AD ART partai Nasdem ataukah tidak sesuai dengan AD ART.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan Partai Nasdem di kota Malang?
2. Mengapa partai Nasdem di Kota Malang melakukan rekrutmen dengan prioritas caleg muda?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui proses rekrutmen calon legislatif yang terjadi dalam partai Nasdem khususnya di kota Malang
2. Untuk dapat mengetahui partai Nasdem di Kota Malang dalam melakukan rekrutmen khusus bagi para pemuda

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan akan menyumbang hal – hal positif dalam segi aspek keilmuan maupun dalam aspek praktis, yakni sebagai berikut:

1. Aspek Akademis
Manfaat penelitian ini sendiri adalah sebagai salah satu dari persyaratan peneliti untuk dapat menyelesaikan studi S1 jurusan ilmu politik Universitas Airlangga.
2. Aspek Pradigmatis

Dalam penelitian ini secara khusus akan dapat untuk mendiskripsikan fenomena yang tengah terjadi pada permasalahan partai politik. Yang kemudian akan dapat menjadi suatu referensi bagi pendidikan politik mengenai permasalahan rekrutmen politik serta kaderisasi politik

3. Aspek Keilmuan

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan bermanfaat bagi keilmuan, khususnya ilmu politik yang akan mengalami pengembangan dalam kajiannya. Tak hanya itu namun dalam sudut pandang penelitian ini di harapkan akan dapat berguna sebagai bahan perbandingan dari penelitian penelitian yang lain. Terutama penelitian yang berhubungan dengan permasalahan rekrutmen serta kaderisasi politik

1.5. Kerangka Teoritik – Konseptualisasi

1.5.1. Kerangka Teoritik

Adapun penelitian kerangka teoritik digunakan untuk landasan berfikir. Sehingga dengan demikian teoritik menjadi aspek penting dalam penelitian dengan disusun sedemikian rupa dan didalamnya memuat pokok pikiran yang dapat digunakan oleh peneliti untuk sudut pandang dalam permasalahan penelitian. Dalam suatu penelitian, teori digunakan peneliti untuk mencapai sebuah tujuan penelitian melalui usaha penelitian untuk melengkapi keterangan pada sebuah fenomena social agar peneliti mengetahui sesuatu secara maksimal. Kemudian teori bertujuan untuk menghasilkan petunjuk yang diperlukan oleh peneliti.

1.5.1.1. Teori Rekrutmen Politik

Rekrutmen ini sendiri digunakan dalam pengertian yang seluas mungkin untuk menunjukkan suatu pelatihan atau training dan persiapan untuk kepemimpinan terbuka bagi masyarakat, penampilan badan legislative pemerintahan serta fungsi – fungsi lain oleh anggota partai serta kompetensi dalam pemilihan.¹¹

¹¹ Amal, Ichlasul. 1996. Teori-Teori Mukthahir Partai Politik. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. Hal.28

Pengertian rekrutmen politik adalah pengangkatan serta seleksi seseorang ataupun kelompok yang bertujuan untuk melakukan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya serta pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik juga merupakan fungsi penyeleksian rakyat yang dimana untuk sebagai kegiatan politik serta jabatan pemerintahan dalam media sarana komunikasi, menjadi anggota organisasi, serta pencalonan diri sebagai anggota tertentu dan sebagainya. Dalam rekrutmen politik tentunya memiliki system politik yang berbeda. Dalam hal ini anggota yang direkrut tentunya harus memiliki kemampuan dalam suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki system rekrutmen yang berbeda-beda. Definisi lain rekrutmen politik juga harus melibatkan warga negara dalam berpolitik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik sendiri digunakan sebagai salah satu cara untuk menyeleksi para anggota yang memiliki bakat dan akan di tempatkan pada suatu jabatan penting yang salah satunya sebagai pemimpin daerah. Dalam hal ini setiap partai politik memiliki cara-cara tersendiri ataupun syarat-syarat pada proses rekrutmen yang dilakukan.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff mengenai teori rekrutmen politik tentunya memiliki keragaman yang sangat banyak. Beberapa system perekrutan dalam rekrutmen politik menurut Rush dan Althof dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Sosiologi Politik*, yaitu;¹²

1. *Seleksi pemilihan melalui ujian atau pelatihan.*

Ujian atau pelatihan merupakan bentuk perekrutan umum di setiap partai politik, hal ini biasanya dilakukan dalam rangka mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Dalam partai disebut juga pendidikan kader partai melalui pelatihan. Cara ini tentunya memiliki banyak keragaman, dan banyak diantaranya memiliki implikasi

¹² Michael Rush, Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 132.

untuk perekrutan politik. Mana cara yang paling penting perlu dikemukakan mengenai metode-metode dalam beberapa hal yang masih dianggap penting dari berbagai system politik.

2. *Seleksi melalui penyortiran*

Salah satu metode paling umum dan tertua yang dipergunakan untuk memperkuat kedudukan pemimpin politik yaitu dengan penyortiran atau penarikan undian.

3. *Seleksi melalui rotasi atau giliran*

Adapun suatu metode yang digunakan untuk mencegah dominasi jabatan atau posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu adalah dengan giliran atau rotasi. Dengan metode ini biasa disebut dengan metode “pilih kasih” Amerika Serikat, pada hakikatnya adalah suatu system perekrutan bergilir. Pada setiap sejumlah negara lain, system ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusional, yang dibuat untuk menjamin kadar rotasi personil eksekutif. Dengan cara ini merupakan bentuk yang dilakukan pada system yang menerapkan format kepemimpinan kolektif pada masyarakat yang memiliki pengelompokan politik yang sangat kental, sehingga menghindari konflik baik partai politik ataupun pemerintahan negara, maka perlu dibuat system rotasi atau giliran.

4. *Seleksi melalui perebutan kekuasaan*

Suatu metode dimana perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau menganam kekuasaan. Akibat yang paling langsung dan nyata adalah penggantian para pemegang jabatan politik dan perubahan-perubahan dalam personel birokrasi. Tentu dengan cara ini biasanya lambat, terutama dengan berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

5. *Seleksi dengan cara partronage*

Sistem ini masih sering dilakukan oleh negara berkembang. Pada abad ke 19, system ini merupakan bagian adari suatu system penyuaapan dan korupsi yang rumit. Dengan metode yang cukup mapan memngaruhi pelaksanaan kekuasaan poltik melalui berbagai pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilohan umum, sebgaiian merupakan saran bagi perekrutan politik, karena selalu dapat dipastikan melalui system patronase.

6. *Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah*

System ini merupakjan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokratis. Hal ini tentunya tetap merupakan suatu factor konstektual yang vital dari sebagian besar system-stem poltik.

7. *Seleksi melalui koopsi*

Suatu metode dimnana merekrut anggota-anggota baru dalam suatau partai politik. Hal ini sering digunakan oleh hampir setiap partai politik. Koopsi meliputi pemilihan ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.¹³

Dalam hal mekanisme rekrutmen partai politik yang di kemukakan oleh Rush dan Althoff, proses perekrutan politik memiliki dua sifat yakni sifat tertutup dan sifat terbuka. Adapun sifat terbuka sendiri merupakan suatu sistem perekrutan adiminstratif yang di dasarkan atas dasar “Koopsi” (co-option) yaitu pemilihan anggota baru. Koopsi itu sendiri meliputi pemilihan seseorang kedalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada baik utnuk melakukan suatu pergantian ataupun untuk dapat membersar keanggotaan. Koopsi dalam ruang lingkup yang lebih luas berlangsung dengan melalui mekanisme

¹³ Ibid

pemilihan yang melibatkan public seperti halnya dalam pemilihan umum.¹⁴

Secara tepat Koopsi meliputi pemilihan seorang anggota baru baik itu dari kalangan pemuda ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada meski hal ini hamper umum terjadi dalam lembaga-lembaga politik seperti Dewan Kota di Inggris dan Wales (baik melalui pemilihan anggota dewan yang bertugas untuk menyusun perundang-undangan kota ataupun sebagai suatu sarana untuk memperbesar anggota).¹⁵ Adanya rekrutmen dinyatakan sebagai suatu sarana untuk dapat memilih diantara dua alternative aatau lebih dengan menggunakan jalan pemberian suara. Akan tetapi tentu disadari dengan adanya keanekaragaman yang tiada terbatas pada sistem pemilihan. Adapun sistem tersebut dapat berbeda sejauh hal ini mengenai pemilihan para pemegang jabatan yaitu berkenaan siapa yang dipilih, oleh siapa, dan bagaimana cara memilihnya. Dengan demikian adanya pemilihan tersebut dapat digunakan untuk menentukan serta memilih para legislative terutama calon legislative muda.

1.5.1.2. Teori Partai Politik

Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Dalam UU Nomor 2 tahun 2011 mengenai partai politik pasal 29, bahawa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik,

¹⁴ Rush Michael dan Althoff Philip. 1985, *Pengantar Sosiologi Politik*, Radjawali, Jakarta hal 189-190

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Dilihat dari Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.¹⁷

Partai politik juga dapat di artikan sebagai suatu organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu atau di bentuk dengan tujuan yang khusus. Atau dalam definisi lain yaitu kelompok yang terorganisir yang anggota – anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. adapun tujuan dari kelompok ini adalah untuk dapat memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan partai politik itu sendiri.¹⁸

Partai politik didirikan untuk dapat mencapai suatu cita-cita serta aspirasi politik tertentu. Adanya partai politik sendiri bukan hanya di gunakan sebagai alat atau kendaraan politik saja akan tetapi partai politik juga merupakan elemen penting dalam demokrasi politik. Hadirnya partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat terlepas dari peran dan fungsinya, tidak hanya pada konstituen yang dikelola namun juga pada bangsa dan negara. Hal tersebut dikarenakan organisasi partai politik dapat menempatkan orang-orang dalam dalam jabatan politisi yang nantinya akan menentukan kebijakan public yang berdampak luas, sehingga hadirnya partai politik ini sendiri juga perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih luas serta tidak terbatas pada kelompok ideologi mereka saja. tak hanya itu saja, partai politik juga memiliki visi misi yang tentunya berbeda pada setiap partai politik untuk dapat mencapai tujuan dari partai politik itu sendiri. Dalam partai politik pun mereka memiliki berbagai macam fungsi yang telah di jelaskan oleh beberapa ahli.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 pasal 29 tentang Partai Politik

¹⁸ Miriam Budiarto. 2008, Dasar- Dasar Ilmu Politik edisi revisi, Gramedia, Jakarta. Hal 403-404

Seperti menurut Miriam Budiarjo, yang menjelaskan fungsi partai politik yakni¹⁹ :

- Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik bertugas untuk dapat menyalurkan beragam aspirasi dari masyarakat serta menekan kesimpang siuran pendapat yang ada di masyarakat. Keberadaan partai politik sendiri menjadi suatu wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest aggregation) agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (interest articulation). Kemudian, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan., untuk diajukan pada pemerintah agar dapat menjadi suatu kebijakan public. Namun disisi lain, partai politik juga bertugas untuk membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

- Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas dari masyarakat, maka akan melakukan berbagai usaha untuk dapat menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh sebab itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya serta masyarakat luas untuk sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan proses tersebut dinamakan sosialisasi politik , yang mana wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar, dan lain-lain. Partai sebagai sarana sosialisasi politik juga merupakan proses penanaman nilai-nilai ideologi serta loyalitas kepada negara dan partai.

¹⁹ Ibid. Hal 405

- Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai sebagai sarana rekrutmen politik merupakan proses politik yang dimana partai politik mencari anggota baru serta mengajak orang yang memiliki bakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut atau ikut untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik. selain itu, rekrutmen politik yang diarahkan pada generasi muda juga akan berpotensi untuk dapat menjadi sarana guna mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dalam struktur partai politik.

- Partai Politik sebagai sarana mengelola konflik

Partai politik bertugas untuk mengelola konflik yang muncul di dalam masyarakat sebagai suatu akibat dari adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Dan partai politik sebagai sarana pengatur konflik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur segala potensi konflik yang ada.

Terdapat empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik menurut La Palombara dan Weiner (1966). dan keempat karakteristik dasar dari partai politik tersebut adalah sebagai berikut²⁰:

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi ini diharapkan akan dapat untuk terus eksis meski pendirinya sudah tidak ada. Organisasi partai politik sendiri bukan hanya sekedar gabungan dari para pendukung yang setia oleh pemimpin yang kharismatik. Partai politik sendiri berfungsi dengan baik sebagai organisasi apabila terdapat sistem serta prosedur yang mengatur aktivitas organisasi serta terdapat mekanisme suksesi

²⁰ Katz, S. Richard, William Crotty, dan Asnawi, Ahmad (penerjemah). 2014. Handbook Partai Politik. Bandung: Penerbit Nusa Media. Hal. 123

yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat local hingga tingkat nasional. Adapun struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin adanya aliran informasi dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi control dan koordinasi
3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan, baik dalam ranah lokal maupun nasional. Hal demikian yang membedakan partai politik dengan kelompok-kelompok atau grup lain yang ada di masyarakat, seperti perserikatan, asosiasi dan ikatan.
4. Dukungan publik yang luas merupakan salah satu cara untuk mendapat suatu kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat, yang kemudian nantinya akan menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa.

Terdapat pula menurut pendapat dari Huntington yang menjelaskan bahwa untuk dapat mengukur kekokohan partai politik terdapat beberapa cara yakni sebagai berikut²¹:

1. Kemampuan untuk mempertahankan pendiriannya atau para pemimpinnya yang kharismatik yang mana tokoh tersebut merupakan tokoh yang pertama kali membawa partai politik dalam masa kejayaan.
2. Kompleksitas serta kedalaman organisasi. Kedalaman organisasi ini dilihat dari komunikasi serta hubungan partai politik dengan kelompok-kelompok eksternal lainnya seperti misalnya serikat buruh, serikat kaum tani, dan lain sebagainya.

²¹ Ibid.

3. Adapun aspek yang ketiga ini diukur melalui sejauh mana partai politik dipandang sebagai wahana untuk mencapai tujuan bersama. Aspek ini memperlihatkan sejauh mana partai politik mampu untuk memperoleh kesetiaan aktor-aktor politik terhadap partai itu sendiri.

Tabel 2. Teori Partai Politik

Karakteristik	Kaukus elit atau Partai Kader	Partai Massa	Partai Catch-all, elektoralis	Partai Kartel	Bisnis Perusahaan
Periode	1860-1920	1880-1950	1950-sekarang	1950-sekarang	1990-sekarang
Dimensi Genetik					
Asal	Asal Parleman	Asal ekstra parlemen	Berawal dari partai massa, menghubungkan atau menggabungkan diri dengan kelompok kepentingan	Fusi partai parlemen dan aparatur negara (dan kelompok kepentingan)	Berasal dari inisiasi pribadi penguasa politik
Dimensi Pemilihan					
Daya tarik pemilihan dan dukungan social	Pemilih yang terbatas dari strata sosial melalui kontak pribadi seperti kelas dan agama	Daya tarik bagi kelompok sosial agama atau etnis tertentu atas dasar	Daya tarik bagi kelas menengah yang luas, diluar kelompok pendukung inti	Klien biasa' yang memberikan dukungan sebagai tukar untuk kebijakan yang	Pasar pemilihan' dengan tingkat volatilitas (pindah pilih) yang tinggi.

		pembelahan sosial		menguntungkan	Pemilih sebagai konsumen
Basis sosial dari jenis rekrutmen elit	Rekrutmen sendiri, inisiatif pribadi. Calon terutama berasal dari kelas atas	Rekrutmen internal berbasis kelas atau agama berdasarkan komitmen ideologi dan organisasi dan melalui sistem pendidikan didalam partai	Rekrutmen eksternal dari berbagai kelompok kepentingan	Rekrutmen terutama dari dalam struktur negara (pegawai negeri sipil)	Perekrutan sendiri inisiatif pribadi
Dimensi Ideologis					
Pentingnya organisasi keanggotaan (partai di lapangan)	Tidak ada atau minimal	Organisasi keanggotaan sukarela adalah inti dari partai	Marginalisasi anggota	Anggota sebagai kolam untuk perekrutan personil politik	Minimal dan tidak relevan
Posisi partai di kantor pusat	Minimal, partai di kantor pusat tunduk pada	Simbiosis antara partai di kantor pusat dan	Tunduk pada partai di kantor public	Simbiosis antara partai di kantor pusat dan partai di kantor publik	Minimal dan tidak relevan

	partai di kantor publik	partai di lapangan			
Posisi partai di kantor public	Inti dari organisasi partai	Tunduk pada kepemimpinan ekstra-parlementer	Konsentrasi kekuasaan dan sumber daya di kelompok fraksi	Konsentrasi kekuasaan pada pimpinan partai parlemen dan pemerintah (partai di kantor publik)	Tingkat otonomi tinggi bagi pengusaha politik individu dalam partai untuk mempromosikan diri
Struktur sumberdaya	Kekayaan pribadi	Sumbangan anggota, organisasi cadangan dan pers partai	Kelompok kepentingan dan subsidi negara	Subsidi negara	Kepentingan perusahaan dan sosial dan kegiatan komersial
Jenis kampanye politik	Kontrak sosial	Mobilisasi massa padat negara	Profesionalisme dan organisasi yang lebih padat modal	Organisasi permanen profesional	Penggunaan ahli secara adhoc dan non parlemen 'kontrak keluar' lebih banyak menggunakan

					an teknik pemasaran
--	--	--	--	--	------------------------

(Sumber: Katz, S.Richard, Wiliam Crotty, dan Asnawi, Ahmad (Penerjemah). 2014. Handbook Partai Politik. Bandung: Penerbit Nusa Media. Hal. 415-429)

1.5.2. Kerangka Konsep

Adapun penelitian kerang konsep digunakan untuk landasan melengkapi kerangka teori. Sehingga dengan demikian konsep menjadi aspek penting dalam penelitian dengan disusun sedemikian dan didalamnya memuat pokok pikiran yang digunakan oleh peneliti. Dengan suaru konsep didalam digunakan peneliti untuk memperdalam trori dalam melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap suatu fenomena socisl secara maksimal.

1.5.2.1. Kaderisasi

Pada dasarnya kaderisasi merupakan suatu hal penting dalam sebuah organisasi, dikarenakan kaderisasi sendiri merupakan sebuah inti yang berkelanjutan untuk meneruskan perjuangan organisasi tersebut kedepannya. Sehingga tanpa adanya kaderisasi suatu organisasi rasanya sangat sulit untuk di bayangkan bahwa organisasi dapat bergerak dan melakukan berbagai tugas keorganisasian dengan baik dan dinamis. Dari adanya kaderisasi ini sendiri nantinya juga akan dapat membangun struktur kerja yang mandiri serta berkelanjutan kedepannya.

Fungsi kaderisasi sendiri adalah untuk mempersiapkan calon-calon baru yang siap untuk dapat menlanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader dalam suatu organisasi merupakan orang yang telah dilatih serta di persiapkan dengan berbagai ketrampilan dan disiplin ilmu, sehingga kader ini nantinya akan dapat memiliki

kemampuan diatas rata-rata orang umum. Pandangan umum mengenai kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon secara umum. Yang pertama pelaku kaderisasi (subjek) dan yang kedua sasaran kaderisasi (objek). Pelaku kaderisasi atau subjek dalam suatu organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam suatu organisasi serta kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah objek dari kaderisasi dengan pengertian lain adalah individu-individu yang mempersiapkan serta dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Adapaun sifat sebagai subjek dan objek dari adanya proses kaderisasi ini sejatinya harus dapat memenuhi beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader-kader organisasi yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologis.²²

Tak hanya itu saja dalam kaderisasi sendiri memiliki peran yang sangat penting guna untuk mentrasfer pengetahuan politik serta keterampilan dan keahlian dalam hal berpolitik, tak hanya soal sejarah, visi, misi serta strategi partai politik namun juga berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan maupun isu-isu yang sedang terjadi pada negara saat ini. Partai politik memiliki tugas utama dalam hal ini yakni salah satunya adalah untuk dapat menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas yang dapat di adu dengan partai politik lain melalui mekanisme pemilihan umum pada nantinya.

Dalam kaderisasi sendiri proses dari kaderisasi dapat dikatakan baik apabila pada tiap organisasi atau partai politik ini dapat menjalankan fungsi organisasi yang terdapat pada AD/ART yang dimiliki oleh tiap organisasi atau partai politik. Penting adanya pendidikan mengenai organisasi dalam suatu organisasi atau partai politik, hal ini dilakukan

²² Syaiful Arifin. 2011, Kaderisasi Organisasi, Diakses pada 22 april 2019, Terdapat di: <http://akusyaifularifin.blogspot.co./2011/05/kaderisasi-organisasi.html>

untuk dapat membentuk tiap kader agar dapat menjalankan segala visi misi organisasi atau partai politik tersebut. Dengan tidak adanya pendidikan kaderisasi pada suatu organisasi atau partai politik maka suatu organisasi atau partai politik ini tidak akan dapat berjalan untuk melakukan fungsi regenerasi serta kesinambungan tugas –tugas dari suatu organisasi atau partai politik itu sendiri.

1.5.2.2. Pemuda

Pemuda merupakan mereka yang sedang menjalani transisi dari masa kanak-kanak menuju periode ketika mereka dituntut untuk menjadi lebih mandiri serta independen. Dan biasanya pemuda ini diidentikkan dengan kaum muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Pemuda juga identik sebagai individu yang berusia produktif serta memiliki karakter khas yang spesifik yakni revolusioner, optimis, berpikir maju, memiliki moralitas. Dan pada periode tersebut pemuda juga diharapkan untuk dapat memiliki kepekaan sebagai suatu bagian dari masyarakat tempat mereka beraktivitas. Bila dilihat secara usia UNESCO telah membatasi mereka, dengan mereka yang disebut sebagai pemuda adalah mereka yang berusia antara 15-24 tahun. Bila UNESCO menetapkan usia pemuda adalah 15-24 tahun namun bagi The African Youth Charter, pemuda merupakan mereka yang berusia antara 15-35 tahun. Adapun batasan ini disesuaikan dengan konteks Afrika serta realitas pembangunan di benua tersebut.²³

Adapun pengertian pemuda menurut Undang- Undang No.40 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.²⁴

²³ Diakses melalui <http://kusumaningrumdiah.blogspot.co.id/2016/10/tentang-pemuda-dan-sosialisasi.html> pada tanggal 24 april 2019

²⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Tentang Kepemudaan.

Presiden Republik Indonesia yang pertama Ir. Soekarno juga pernah mengatakan dalam pidatonya yang dimana dalam pidato tersebut beliau berusaha untuk mengobarkan semangat juang Pemuda dengan mengatakan “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kugoncangkan dunia”. Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa begitu sangat besarnya peranan pemuda di mata soekarno dan begitu berpengaruhnya dalam negara.

Adapun menurut Muhammad Ali (1989:258): “Muda diartikan belum sampai setengah umur, belum cukup umur”. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pengertian muda lebih di fokuskan pada usia dengan batas tertentu penggolongannya seperti pada anak-anak dan remaja. Akan tetapi menurut N. Daldjoni (1974:35) dijelaskan generasi merupakan “keseluruhan individu dalam masyarakat yang sebenarnya sebagai akibat dari pengalaman yang mirip serta keterkaitan yang sama, bersikap kritis terhadap generasi atasnya”. Dan dari pengertian tersebut dapat di katakan bahwa generasi menunjukkan tempat atau kedudukan mereka bersama sebagai kelompok usia. Adapun pengertian dari generasi muda sendiri adalah keseluruhan orang yang memiliki kesamaan dalam masa hidupnya akibat dari pengalaman yang mirip serta keterkaitan yang sama bersikap kritis terhadap generasi.

1.6. Metode dan Prosedur Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut pendapat Lisa Horison pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang cenderung fokus pada usaha untuk mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik serta

mencerahkan.²⁵ Adapun beberapa pertimbangan pemilihan metode ini adalah diantaranya:

- Yang pertama dikarenakan permasalahan yang diteliti merupakan mengenai proses atau suatu fenomena bukan suatu hubungan antar variable. Maka dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana proses partai Nasdem merekrut calon legislatif muda pada pemilu 2019 di Kota Malang.
- Yang kedua guna dapat memperoleh gambaran secara mendalam fenomena atau permasalahan penelitian. Hal demikian di lakukan dengan cara peneliti mendengar secara langsung narasumber berbicara mengenai bagaimana proses rekrutmen caleg serta sistem kaderisasi partai nasdem apakah sudah melakukan kaderisasi dengan baik dan sesuai.

1.6.2. Jenis data

1.6.2.1. Data Primer

Adapun pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara pewawancara dengan informan. Dimana pewawancara ini memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian dan informan memberikan jawaban sesuai dengan penelitian. dalam wawancara pedoman wawancara dibagi menjadi tiga tipe teoritis: standar, semistandar, dan tak berstandarisasi. Dalam penelitian ini menggunakan tipe semistandar, yaitu pewawancara bisa meminta penjelasan dari jawaban yang telah diberikan oleh informan. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara juga digunakan pada penelitian ini. Jadi maksudnya adalah pewawancara terlebih dahulu menyiapkan kerangka serta garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan

²⁵ Lisa Horrison.2007. Metodologi Penelitian Politik. Kencana Perdana Group, Jakarta.

pada informan saat proses wawancara. Dan kemudian mengajukan pertanyaan secara berurutan sesuai dengan pedoman wawancara. Hal ini dilakukan agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya dalam proses wawancara

1.6.2.2. Data Sekunder

Dalam menunjang kelengkapan data pada penelitian. maka dilakukan penelitian dengan menggunakan data kepustakaan, media massa atau media online (internet), serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1.6.3. Fokus Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan ini fokus penelitian ditunjukkan kepada DPD serta tim seleksi partai Nasdem kota Malang tersebut adalah dikarenakan penelitian dapat untuk secara langsung berwawancara pada narasumber serta mendapat informasi secara tepat dan benar.

1.6.4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah partai yang terlibat langsung dalam permasalahan ini yakni partai Nasdem kota Malang. Dikarenakan jenis penelitian ini bersifat kualitatif, diperlukan adanya kriteria-kriteria umum yang dimiliki oleh informan, yang diantaranya adalah pihak – pihak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Mengenai permasalahan partai Nasdem dikota Malang. Oleh sebab itu, pada penelitian ini subyek penelitian merujuk kepada para pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

1.6.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitian yaitu berupa pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, dengan tujuan agar diperoleh jawaban yang lebih luas, rinci,

mendalam, serta detail. Pada saat melakukan proses wawancara penelitian digunakan alat bantu perekam serta buku catatan yang bertujuan untuk mendapat data yang valid dan reliable mengingat keterbatasan waktu penelitian yang dilakukan.

1.6.6. Tahap dan Prosedur Penelitian

- Pada tahap yang pertama, yakni tahap pra lapangan. Dimana dalam tahap ini dilakukan penyusunan rancangan penelitian, dilanjutkan dengan memilih lokasi dilakukannya penelitian. kemudian yakni mengurus segala administrasi perizinan untuk melakukan penelitian, seperti surat pengantar serta surat ijin dari pihak institusi yang berwenang dan selanjutnya yaitu langkah dalam memilih subjek penelitian yang dilakukan.
- Pada tahap yang kedua, yakni tahap pekerjaan lapangan, yang dilakukan setelah tahap pra lapangan yakni informasi ringan maupun sekilas mengenai objek penelitian telah didapatkan seperti misalnya, mengenal pihak informan, mengetahui alamat kantor atau instansi tempat informan dan lain sebagainya. Pada tahapan ini peneliti berusaha untuk memahami latar penelitian atau terjun langsung ke lapangan tempat penelitian dilakukan. Sehingga peneliti lebih berperan serta pada penggalian data penelitian.
- Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap analisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan konsep dasar analisis data yang mempersoalkan analisis data.

1.6.7. Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini teknik pengumpulan data yang akan saya terapkan adalah teknik:

- Teknik yang pertama adalah wawancara dengan pertanyaan mendalam (in depth interview) yang

dilakukan pada narasumber atau informan penelitian secara terstruktur

- Teknik yang kedua adalah catatan lapangan (field notes) yakni mencatat segala kejadian secara tertulis mengenai apa saja yang didengar, dilihat, dialami, serta dipikirkan oleh peneliti serta narasumber dalam rangka pengumpulan data
- Teknik yang ketiga adalah penggunaan dokumen yakni melakukan penelitian terhadap bahan tertulis serta bentuk lain (data umum, data statistic, gambar, arsip dan lain sebagainya, baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi).

1.6.8. Lokasi Penelitian

Adapun dalam penelitian ini dilakukan di kota Malang Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan karena penelitian berfokus mengenai Partai Nasdem di Wilayah Malang sehingga penelitian akan membutuhkan banyak data mengenai permasalahan Partai Nasdem di wilayah Malang dan akan lebih memudahkan peneliti untuk mencari serta mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Tak hanya itu saja, peneliti juga sering untuk berkunjung ke kota Malang sehingga peneliti akan dapat lebih menghemat dari segi waktu karena pelaksanaan penelitian akan dilakukan bersamaan dengan peneliti yang sering berkunjung ke kota Malang. Maka itu sebabnya mengapa peneliti melakukan penelitian di kota Malang.

1.6.9. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini data yang terkumpul dari hasil penelitian akan dikategorikan berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus penelitian, lalu kemudian di interpretasikan dalam kerangka

teoritik sesuai dengan pendekatan politik yang disajikan sesuai permasalahan penelitian, dan disertai pula dengan data pendukung yakni hasil wawancara penelitian.

Adapun langkah awal yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan pencarian data yakni memindahkan hasil wawancara atau transkrip yang kemudian di olah serta dianalisis secara kualitatif sehingga fenomena yang terjadi di lapangan penelitian dapat di gambarkan secara jelas dan detail.

Dan pengolahan data yang peneliti lakukan yakni dengan cara mendeskripsikan hasil dari wawancara dengan menghubungkan hasil wawancara tersebut dengan refrensi atau konsep –konsep yang sesuai, yang mana konsep-konsep yang digunakan ini sering dikenal dengan pisau analisis. Hal demikian dilakukan agar data data tersebut akan menjadi suatu uraian yang jelas serta mudah untuk dibaca dan dipahami oleh orang lain.

1.6.10. Teknik Analisi Data

Pada penelitian yang dilakukan analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari catatan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian serta menyusun secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lainnya yang dihimpun untuk dapat memperoleh deskripsi secara utuh mengenai cara Partai Nasdem merekrut calon legislatif serta sistem kaderisasinya.

Analisis data pada laporan penelitian ini disusun dengan pembahasan berdasarkan pada hasil wawancara penelitian dengan informan. Adapun proses analisis data ini dilakukan dengan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan²⁶ yakni:

²⁶ Lisa Horrison. 2007 ,Metodologi Penelitian Politik, Kencana Pernada Group, Jakarta.

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yakni kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi sendiri adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses serta pernyataan – pernyataan yang perlu dijaga sehingga akan tetap berada didalamnya.
2. Paparan data, menyusun data kedalam satu kesatuan
3. Penarikan simpulan atau verifikasi yakni kegiatan menyimpulkan segala makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya,kekokohnya serta kecocokannya.